



**Cegah Kriminalitas,
Jeje Minta RT dan RW Aktif
Pantau Indekos serta Kontrakan**



**34 Pembina Pramuka
Kabupaten Bandung
Lulus Kursus Pamong Saka**

IMEDIA ONLINE & CETAK

SPJNEWS.id
SINGKAT-PADAT-JELAS

Since 2009

Pendiri
IKMAL DAVID PERMANA (Aim)



TAHUN XIII | EDISI-131 | JULI-AGUSTUS 2026 - 1448 H

Website: spjnews.id | Email: spjnews.spj@gmail.com

Rp. 15.000



LSM BADAQ Desak Usut Pembelian Aset Pemda

TULUNGAGUNG, SPJNEWS | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BADAQ menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan dugaan manipulasi dalam

pembelian aset Pemerintah Daerah (Pemda) Griyo Dalem Kanjengan. Organisasi tersebut menyatakan akan mengawasi jalannya proses hukum secara ketat hingga perso-

alan tersebut memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

Ketua Umum LSM BADAQ, Suwandi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti mengawal

kasus yang dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah.

Menurutnya, pengawasan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Sekali melangkah, pantang mundur," tegas Suwandi saat menyampaikan sikap organisasi, beberapa waktu lalu.

● KE HALAMAN 11



Temuan BPK di Garut, Pengembalian Dana Masih Diverifikasi



GARUT, SPJNEWS | Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah di tujuh kecamatan di Kabupaten Garut masih menjadi perhatian publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 13/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.03/02/2026 mengungkap adanya berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Temuan tersebut mencakup belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, belanja yang tidak sesuai dengan kondisi

sebenarnya, hingga dugaan penyalahgunaan dana pemerintah. Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah terhadap rekomendasi BPK.

Berdasarkan LHP tersebut, Kecamatan Bungbulang menjadi salah satu kecamatan yang mendapat sorotan. BPK menemukan belanja yang tidak didukung bukti sah sebesar Rp61,7 juta, belanja yang diduga fiktif senilai Rp32,4 juta, penggunaan anggaran sekitar Rp25 juta untuk per-

baikan kendaraan dinas yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan rekening pribadi camat sebagai tempat penyimpanan dana Uang Persediaan (UP) dengan nilai sekitar Rp69,3 juta yang pertanggungjawabannya dinilai belum memadai.

Sementara itu, di Kecamatan Leuwigoong ditemukan belanja tanpa bukti pertanggungjawaban sebesar Rp11,9 juta dan belanja barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp11,6 juta.

● KE HALAMAN 11

Isbat Nikah Terpadu: Ikhtiar Menyempurnakan Sebuah Akad

Oleh: **Syafaat**



Saya semestinya bergembira ketika ada ormas keagamaan menjalin ikhtiar bersama Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam menghadirkan layanan Isbat Nikah Terpadu, proses dalam satu tempat yang bukan hanya mengesahkan pernikahan, namun juga peribadan administrasi kependudukan hingga terbit Akta Kelahiran anak-anaknya. Kolaborasi itu adalah wajah nyata dari negara yang hadir, organisasi keagamaan yang bergerak, dan lembaga sosial yang bergandengan tangan demi mengembalikan hak-hak warga.

Di balik rasa syukur itu, saya justru dibuat terdiam. Bukan oleh rumitnya proses hukum, melainkan oleh sebuah angka. Lebih dari dua ratus pasangan mengajukan permohonan pengesahan nikah. Angka yang bukan sekadar statistik, melainkan potret remang yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita.

Dua ratus kisah tentang akad yang bisa jadi menggetarkan langit, tetapi belum tercatat dalam administrasi manusia. Dua ratus keluarga yang telah membangun rumah tangga, mungkin sudah membesarkan anak-anak, mengarungi suka dan duka, namun masih berjalan di lorong yang belum sepenuhnya memperoleh kepastian hukum, barangkali di sinilah kita perlu merenung.

Islam mengajarkan bahwa nikah bukan hanya penyatuan dua insan yang saling mencintai. Ia adalah mitsaqan ghalizhan, sebuah perjanjian yang kokoh. Perjanjian yang bukan hanya disaksikan wali dan dua orang saksi, tetapi juga menjalankan fitrah yang sudah digariskan oleh Allah Swt.

Karena itu, pernikahan bukan sekadar ruang untuk menuntut hak dan menunaikan kewajiban. Ia adalah ibadah. Ia adalah jalan penghambaan. Di dalamnya terdapat fungsi ubudi-

yah, tempat seorang hamba membuktikan ketaatan kepada Rabb-nya melalui kehidupan keluarga yang sakinah. Namun Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kemaslahatan.

Dalam konteks kehidupan bernegara, pencatatan perkawinan bukanlah upaya mengurangi kesucian akad. Sebaliknya, ia menjadi instrumen untuk menjaga maqashid syariah, melindungi keturunan (hifzh al-nasl), menjaga hak-hak keluarga, menjamin status hukum suami istri, melindungi anak-anak, memastikan hak waris, hingga memberikan kepastian atas dokumen-dokumen kependudukan. Karena itu, Isbat Nikah bukanlah sekadar proses administratif. Ia adalah jembatan antara kesahan syariat dengan kepastian hukum negara.

Meski demikian, tidak setiap permohonan berakhir dengan kabar yang melegakan. Di hadapan meja hijau, belas kasih tidak dapat berjalan sendiri tanpa bergandengan tangan dengan keadilan. Pengadilan Agama memikul amanah yang jauh lebih besar daripada sekadar mengabdikan harapan.

Setiap permohonan harus ditimbang dengan cermat, diperiksa kesesuaiannya dengan rukun dan syarat pernikahan menurut syariat, diuji terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta dipastikan memiliki landasan hukum yang kokoh.

Sebab hukum bukan hanya tentang menemukan jalan keluar, melainkan juga menjaga agar

setiap jalan tetap berada dalam koridor kebenaran. Karena itu, ada saat ketika sebuah permohonan harus diterima, tetapi ada pula saat ketika ia harus ditolak. Bukan karena hakim menutup pintu kasih sayang, melainkan karena hukum memiliki batas yang tidak boleh diterobos oleh rasa iba semata. Keadilan tidak selalu menghadirkan jawaban yang menyenangkan, tetapi ia harus tetap tegak agar tidak berubah menjadi keberpihakan yang melukai kepastian hukum.

Di sinilah kegelisahan saya bermula. Bila permohonan itu dikabulkan, setidaknya ada secercah cahaya yang dapat menerangi ruang-ruang keluarga yang selama ini diselimuti ketidakpastian.

Ada anak-anak yang memperoleh kepastian nasab, ada istri yang memperoleh pengakuan, ada suami yang dapat bertanggungjawabkan ikatan yang selama ini hanya hidup dalam keyakinan agama. Sebuah putusan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu yang retak dengan masa depan yang lebih tertata.

Namun, bagaimana bila permohonan itu ditolak? Pertanyaan itu selalu menggema lebih lama daripada bunyi palu sidang yang mengakhiri persidangan. Ke manakah keluarga itu akan melangkah? Bagaimana seorang ibu menjelaskan kepada anaknya bahwa cintanya kepada sang ayah tidak pernah dipersoalkan, tetapi ikatan mereka belum dapat diakui oleh hukum? Bagaimana seorang ayah memandang keluarganya ketika negara belum dapat mencatat perjalanan hidup yang telah mereka bangun bertahun-tahun?

Di titik itulah saya menyadari bahwa di balik setiap berkas perkara, sesungguhnya tersimpan kehidupan yang sedang memohon untuk dipahami. Tidak semua kisah lahir dari kesengajaan melawan hukum; sebagian bermula dari cinta yang datang terlalu tergesa, begitu buta hingga mengabaikan norma, adat,

bahkan ketentuan yang semestinya menjadi penuntun.

Cinta memang mampu mengalahkan segalanya, tetapi ia tidak selalu mampu menanggung akibat dari keputusan yang diambil atas namanya.

Di balik lembar-lembar permohonan yang tampak kering oleh bahasa hukum, ada air mata yang tak pernah tertulis, ada penyesalan yang tak sempat diucapkan, ada doa-doa yang tidak tercatat dalam berita acara persidangan, serta harapan yang diam-diam bergantung pada setiap ketukan palu hakim.

Hukum, pada akhirnya, harus tetap berdiri tegak sebagai penjaga keadilan dan kepastian, sebab tanpa itu ia akan kehilangan wibawanya.

Namun, di balik ketegasannya, selalu ada wajah-wajah manusia yang menanti secercah cahaya, berharap kesalahan masa lalu tidak selamanya menjadi hukuman bagi masa depan, dan berharap negara masih menyediakan ruang bagi mereka untuk kembali menemukannya kepastian, martabat, dan kesempatan memperbaiki kehidupan yang pernah mereka bangun dengan cinta, meski cinta itu dahulu datang tanpa cukup kebijaksanaan.

Penolakan bukan sekadar berakhir pada putusan hakim. Ia dapat melahirkan konsekuensi hukum yang panjang. Kepastian hubungan keperdataan menjadi persoalan.

Status hukum dalam berbagai aspek administrasi menjadi lebih rumit. Bahkan dalam kondisi tertentu, persoalan nasab, hak-hak anak, maupun hubungan keperdataan dapat memerlukan penyelesaian hukum yang tidak sederhana.

Yang paling mengkhawatirkan, pihak yang paling rentan menanggung akibatnya sering kali bukanlah orang tua, melainkan anak-anak yang sama sekali tidak memilih dilahirkan dalam keadaan demikian.

Penulis: ASN Kemenag/Ketua Lentera Sastra Banyuwangi

Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang
 Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers
 Oleh : PT. SPJ ABDI SEJAHTERA
 S.K. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : AHU-01486.AH.01.30.Tahun 2022.
 TANGGAL 20 APRIL 2022

Pembina : Drs. ABDUL TALIB RACHMAN, Ak, MBA
 Pemimpin Umum: MOCH. FAUZAN RACHMAN, SE

Penanggungjawab/Pemimpin Perusahaan :
 IKMAL DAVID PERMANA

Pemimpin Redaksi : HERMAN. SH
 Redaktur : AJANG PENDI
 Koordinator Liputan : TONI ADAM

Konsultan Hukum : HERMAN. SH, ASEP MULYANA. SH, DENY KUSWANDY. SH, SAYYID M IQBAL RAHMAN. SH., M.H

Kuangan : INNE SUPRIATIN

Dewan Redaksi : KUSNANDAR, BUDIYONO, HERMAN. SH, AJANG PENDI, MOCH. MANSYUR, H. MOCH. SALIFI RACHMAN, ARI WIBIKSANA, SE, APIP SARIPUDIN, SARIEF HIDAYAT. SE, ARIS, BANG ANA

Kab. Bandung: HERMAN. SH, TONNY ADAM, BANGBANG, M. AJANG SURYANA, NURHALIM ISMAIL. SH Bandung Barat : HERMAN. SH

Kota Bandung : H. MOCH. SALIFI RACHMAN, NANDAR, HARIS NUGRAHA, DONNI, ASEP SOLIHIN, MUHADI ROHMAN.

Propinsi Jabar: IWAN HERMAWAN, DEDI SETIADI, HERMAN, SH

Biro Garut : UGAN SUGANDI (Kabiro), AJANG PENDI, H. IWAN SE-TIAWAN, PUPU ABDUL LATIEF, TENDI JUHARMAN (Biro Redaksi: Jl. Bratayudha-Galumpit RT02/26 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Tlp. 081394288233)

Biro Bandung Timur : DAUD
 Biro Ciamis-Pangandaran : ENDANG KOSWARA, S. IP
 Biro Sukabumi : YOGA DANIS (Kabiro)
 Biro Majalengka : MAMAN SARMAN
 Biro Cilegon : MUSLIMIN (Ka. Biro)
 Biro Serang Banten : WAHYUDIN (Kabiro), ADE SUPRIYANA
 Biro Kab. Lebak : UDAS SURYANA (Kabiro)
 Biro Tangerang Selatan : IWAN SUTISNA
 Biro Propinsi Jawa Timur : ASEP YUMARWOKO. ST. MM, (Kabiro)
 MOCH. HASAN MUSRI, (Kabiro), SARI
 Biro Madiun: ISNANDAR, MUJI HARTONO, BAMBANG, PUGUH YUHANA
 Biro Kab. Tulungagung : MUALIMIN, (Kabiro)
 Biro Kab. Mojokerto : SYAIFUL BAKHRI, (Kabiro)
 Biro Kab. Nganjuk : ALFAN SARONI (Kabiro), EDI YULIANTO, TRI PRAYITNO
 Biro Madura: FENDI RIYANTO (Kabiro), ABDULLAH, S.Si. (Kabiro Pamekasan)
 Biro Kab. Pacitan: SUPRAPTO
 Biro Kab. Gresik : MUHAMMAD HUDIN (Kabiro), ENDAH LELYANI, M. TARSAN, MUHAMMAD HARIYANTO, ABDUL, BANG DOEL
 Biro Sidoarjo : SARI
 Biro Lamongan : ---
 Biro Jombang : RATNO HADI (Kabiro), DIANA KHOLIDAH
 Biro Propinsi Jawa Tengah : SUGENG RIYANTO (Kabiro)
 Biro Kab. Wonogiri : YAYAK NURMANTO (Kabiro)
 Biro Kota Makassar : IR. WALINONO HADDADE (Kabiro)
 Biro Sulut : HOWARD HENDRIEK MARIUS
 Biro Sulawesi Selatan : Drs. SADIKIN. S (Kabiro), JUFRI, MOCH. SULAIMAN, NURDIN. SE, HARUNA HAMBALI. S.Pd
 Biro Kab. Gowa : ABD AZIS. SE (Kabiro), RISWANTO. S.Sos, MUH. JAFAR, SAFRIAH. S. Kom, SAMSUNAR ALAM
 Koordinator Biro Sulawesi Selatan : HAENUMAR KARAENG MUANG
 Biro Kab. Takalar : RAHIM. DG SUA (Kabiro)
 Biro Palembang : HARTONI (Kabiro)
 Biro Provinsi Aceh : M. CHAIRULLAH (Kabiro)

REDAKSI/TATA USAHA:
 Jl. Lamajang 2 Zypur Dayeuhkolot Kab. Bandung
 Tlp.083152959339
 Perwakilan: Jl. Batik kumeli No. 32 Bandung
 Perwakilan: Jl. Manjahlega-Bandung Blkg METRO
 Tlp.083152959339

Perwakilan: Kota Bandung:
 Jl. Karawitan 25 Bandung Tlp. 08221402517

Perwakilan: Kab. Bandung: Jl. St. Barat Banjaran No. 138 Banjaran Bandung 40377 Tlp. 085221397120 - 0895601616189

Rekening Bank BCA: 7751003637 an. IKMAL DAVID PERMANA

email:spjnews.spj@gmail.com-website:spjnews.id

Dede Yusuf Pemangkasan Dana Desa, Khawatir Pelayanan Publik Terganggu

DPR Dorong Kemendagri Tangani Polemik PPPK

JAKARTA | Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pengurangan alokasi dana desa yang dianggap mengalami penurunan secara signifikan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana tanggung jawab dan beban pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa justru terus meningkat.

"Pemotongan Desa dari 1,3 miliar hingga hanya tinggal 370 juta. Hampir semua Kepala Desa mengatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan 370 juta ini," ujar Dede Yusuf dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, pengurangan anggaran tersebut menimbulkan pertanyaan terkait arah kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung operasional pemerintahan desa.

Padahal, desa memiliki tanggung jawab besar untuk menangani berbagai persoalan mendasar yang penting dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Nah, apakah konsep Kement-



terian Keuangan ataupun Pemerintah saat ini adalah membiarkan Desa megap-megap? Tetapi tugasnya juga semakin banyak, apalagi yang disampaikan tadi permasalahan sampah dan lain-lain ini masih menjadi salah satu tugas yang penting," ujarnya.

Selain menjalankan fungsi pengawasan secara kelembagaan, sebagai Pimpinan Komisi II DPR RI dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, ia juga kerap menerima aspirasi serta keluhan langsung dari masyarakat di daerah

pemilihannya saat melakukan kunjungan kerja. Salah satu persoalan yang sering disampaikan warga adalah belum optimalnya penanganan layanan publik dasar, seperti masalah sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan di sejumlah kabupaten dan kota.

"Hampir setiap hari kalau kami turun ke daerah, permasalahan yang pertama selalu disampaikan masyarakat adalah, memang betul, masalah pelayanan publik yaitu sampah. Pemerintah Kabupaten juga kesulitan, Pemerintah Provinsi

juga kesulitan," ungkap Dede Yusuf.

Lebih lanjut, hasil evaluasi dan keluhan dari berbagai asosiasi kepala daerah ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk segera memetakan ulang formula TKD agar fungsi pelayanan paling dasar tidak lumpuh.

"Kebetulan di Komisi II ini urusannya asosiasi-asosiasi Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Desa, sehingga boleh dikatakan kami perlu menyampaikan suara ini kepada Bapak dan Ibu semua," pungkasnya. (SPJ-03)

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta pemerintah daerah tidak memecat atau merumahkan PPPK meski menghadapi keterbatasan anggaran. Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi protes PPPK paruh waktu di Tidore Kepulauan, Maluku Utara, setelah pemerintah kota berencana merumahkan tenaga kontrak.

Cucun mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, segera memfasilitasi kepastian status PPPK dan membantu mencari solusi agar beban pembiayaan tidak sepenuhnya ditanggung daerah. Ia juga meminta Kemendagri turun tangan menangani persoalan di Tidore.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp132 triliun untuk membantu daerah membayar gaji PPPK dan guru honorer. Menurutnya, banyak daerah mengalami tekanan fiskal yang berat.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengusulkan agar pembiayaan PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, ditanggung APBN, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal yang lemah. (SPJ-06)

BAKUMRA Permudah Akses Bantuan Hukum bagi Warga Kurang Mampu

KAB. BANDUNG | Masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan hak-haknya ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Kondisi tersebut kerap membuat warga, terutama dari kalangan kurang mampu, merasa bingung, takut, bahkan kesulitan memperoleh pendampingan hukum yang layak. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang memilih menyerah atau membiarkan persoalan hukum berlarut-larut karena terkendala minimnya pengetahuan serta keterbatasan biaya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dr. M. Akhiri Hailuki, S.I.P., M.Si. mendirikan Balai Bantuan Hukum Rancage (BAKUMRA) sebagai wadah yang memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara gratis bagi warga Kabupaten Band-

ung yang membutuhkan.

Komitmen untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat terus diwujudkan oleh Dr. M. Akhiri Hailuki, S.I.P., M.Si. melalui pendirian Balai Bantuan Hukum Rancage (BAKUMRA). Kehadiran lembaga ini menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang menghadapi persoalan hukum namun memiliki keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.

BAKUMRA membuka program layanan konsultasi dan pendampingan hukum secara rutin sebanyak dua kali dalam sebulan, setiap hari Jumat, yang dipusatkan di Markas Komando Rancage, Baleendah, Kabupaten Bandung.

Layanan yang diberikan mencakup berbagai persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat, di antaranya permasalahan hubungan

kerja, sengketa tanah dan properti, utang piutang, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hak cipta, hingga persoalan perdagangan.

Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya. Program ini secara khusus ditujukan bagi warga Kabupaten Bandung yang kurang mampu agar tetap memiliki kesempatan memperoleh pendampingan hukum yang layak tanpa terbebani biaya.

Dr. M. Akhiri Hailuki berharap kehadiran BAKUMRA dapat menjadi jalan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan keadilan merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan yang damai serta berkeadilan.

Dengan hadirnya BAKUMRA,



diharapkan semakin banyak masyarakat yang berani mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi-

pi melalui jalur yang benar, sehingga hak-hak mereka dapat terlindungi secara optimal. (SPJ-05)

Tegas, Erwan Bakal Pecat ASN Terlibat LGBTQ

BANDUNG | Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan tak ada ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ambil bagian atau menyebarkan budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).

Jika ada ASN terlibat LGBTQ, Erwan memastikan akan ada sanksi berat. Demikian disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan saat ditemui di Kota Bandung, Kamis (9/7/2026) lalu.

"Kalau sampai ada ASN yang LGBT, kita akan berikan tindakan yang sangat tegas dan sesuai dengan perundang-undangan. Kita akan menghentikan mereka. Yang paling beratnya untuk memberhentikan mereka. Dan apabila ada hal-hal yang bersifat pidana, kami silakan kepada aparat penegak hukum," tegas Erwan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri memang belum memiliki peraturan khusus untuk larangan LGBTQ ini. Namun, DPRD Jabar saat ini tengah menggodok untuk mengantisipasi penyebaran budaya tersebut.

"Sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa kami, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memerangi yang namanya LGBT di wilayah Jawa Barat. Kami akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menindaklanjuti bagaimana fenomena LGBT ini tidak berkembang lebih lanjut lagi di Jawa Barat," jelas Erwan.

Dia pun mengajak masyarakat agar turut melaporkan jika terdapat perbuatan LGBTQ yang mengganggu dan meresahkan masyarakat melaporkan kepada pihak berwenang.

"Saya berharap masyarakat pun memberikan laporan-laporan yang akurat, laporkan pada kepolisian maupun kepada kami, sehingga kami segera cepat bertindak untuk memberantas LGBT di Jawa Barat juga," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat memasukan budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-



2029.

Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 itu, tertulis ancaman terhadap negara dibagi ke dalam tiga kategori, yakni ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.

Kendati begitu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan, Indonesia belum siap menerima LGBT sebagai kelompok yang diakui secara sosial maupun regulasi. Meski demikian, Pigai me-

negaskan negara tetap wajib menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk kelompok LGBT.

"Hak dia sebagai warga negara Indonesia, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan penghidupan yang layak sebagai warga negara harus dijamin oleh negara," kata Pigai.

Sementara, anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aid Maazat mengatakan, ancaman terhadap negara

kini tidak hanya berbentuk invasi bersenjata, tetapi juga penyebaran ideologi, budaya, dan nilai.

"Di era modern, ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk invasi bersenjata. Ancaman juga dapat hadir dalam bentuk penyebaran ideologi, budaya, dan nilai yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara utuh dari perspektif ketahanan nasional," ujar Syahrul. (SPJ-14)

DPRD Jabar Minta Pemerintah Selamatkan Peternak

KAB. BANDUNG | Penurunan harga telur ayam dan daging ayam broiler yang terjadi belakangan ini dinilai berpotensi semakin membebani para peternak di Jawa Barat. Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata guna mengendalikan harga pasar agar kerugian yang dialami peternak tidak semakin meluas.

Menurut Saeful, merosotnya harga komoditas peternakan tersebut tidak hanya disebabkan oleh

penghentian sementara operasional dapur yang mendukung pelaksanaan program. Ia menilai terdapat berbagai faktor lain yang ikut memengaruhi turunnya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak.

"Peternak telur sekarang semakin banyak. Hampir di setiap daerah bermunculan peternak baru. Begitu juga usaha ayam pedaging terus bertambah sehingga pasokan melimpah," kata Saeful di Soreang, Rabu (1/7/2026) lalu.

Selain dipengaruhi melim-

pahnya pasokan, menilai penurunan daya beli masyarakat turut menjadi penyebab merosotnya harga komoditas peternakan. Ia menyebut terjadi perubahan pola konsumsi di masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan terhadap telur maupun daging ayam broiler.

Saeful juga menyoroti masuknya suplai telur dan ayam dari sejumlah daerah lain, seperti dan , yang membuat persaingan pasar semakin ketat, terutama di wilayah.

Kondisi tersebut berdampak

pada terus tertekannya harga jual di tingkat peternak. Saat ini harga telur di tingkat pengecer berada di kisaran Rp22.500 per kilogram, sedangkan harga yang diterima peternak diperkirakan hanya sekitar Rp20.000 per kilogram. Nilai tersebut dinilai telah berada di bawah harga pokok produksi (HPP), terlebih di tengah biaya pakan ternak yang terus mengalami kenaikan.

"Kalau melihat biaya produksi, tentu harga sekarang belum menutup ongkos yang harus dikeluarkan peternak. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah," ujarnya.

Saeful mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah pusat segera menyiapkan langkah penyelamatan. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali operasional program MBG agar mampu menyerap produksi peternak. Pandalan Kota & Daerah

Selain mendorong upaya penyerapan produksi, ia juga meminta pemerintah turut memperkuat jaringan pemasaran komoditas ayam dan telur hingga ke



tingkat pedagang pengecer guna meningkatkan permintaan pasar. Menurutnya, kondisi di Jawa Barat jangan sampai mengalami situasi serupa dengan sejumlah daerah lain yang terpaksa mendistribusikan telur secara gratis akibat melimpahnya stok yang tidak berhasil diserap oleh pasar.

"Intinya pemerintah harus cepat turun tangan. Jangan sampai peternak semakin merugi karena harga jual turun sementara harga pakan dan obat-obatan sangat tinggi," ujar Saeful Bachri. (SPJ-06)



Cegah Kriminalitas, Jeje Minta RT dan RW Aktif Pantau Indekos serta Kontrakan

BANDUNG BARAT | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengajak seluruh pengurus RT dan RW untuk meningkatkan pengawasan terhadap rumah indekos dan kontrakan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindak kriminal di lingkungan masyarakat.

Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyusul terungkapnya kasus penyekapan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Peristiwa yang mengundang perhatian publik itu dinilai menjadi pengingat penting bahwa kewaspadaan masyarakat dan aparat lingkungan harus terus diperkuat.

Menurut Jeje, kejadian tersebut menjadi alarm bagi seluruh pihak agar tidak menganggap remeh aktivitas yang dinilai tidak biasa di lingkungan tempat tinggal. Ia menegaskan, keamanan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pengurus wilayah dan masyarakat.

"Ini alarm buat kita, pengurus RT dan RW harus semakin rutin berkunjung, mengecek untuk mengantisipasi kejadian di Cileunyi



(Kabupaten Bandung), itu kan cukup miris," ujar Jeje saat ditemui di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/6/2026) lalu.

Ia menjelaskan, rumah indekos dan kontrakan merupakan salah satu tempat yang membutuhkan perhatian lebih karena mobilitas penghuninya cukup tinggi. Oleh sebab itu, keberadaan penghuni baru maupun aktivitas yang berlangsung di rumah sewa perlu diketahui oleh pengurus lingkungan agar situasi keamanan tetap terpantau.

Jeje menilai, pengawasan tidak

harus dilakukan ketika sudah muncul persoalan. Sebaliknya, langkah pencegahan melalui pemantauan rutin dinilai jauh lebih efektif dalam meminimalkan potensi terjadinya tindak kriminal maupun gangguan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, pengurus RT dan RW perlu memastikan setiap penghuni indekos maupun kontrakan telah terdata dengan baik, termasuk mengetahui identitas serta asal-usul penghuni yang tinggal di wilayahnya. Dengan data yang lengkap, koordinasi dengan aparat

keamanan akan lebih mudah dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi persoalan.

Selain memperkuat peran pengurus lingkungan, Jeje juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi di sekitar tempat tinggalnya. Ia berharap budaya saling mengenal dan saling memperhatikan antarwarga dapat terus dibangun sehingga aktivitas yang mencurigakan dapat segera diketahui.

"Tetangga juga harus aware, peduli, yang di Cileunyi itu kan cukup

kejam sekali, dan bertahun-tahun. Kalau warga atau tetangganya aware mungkin bisa dihindari," katanya.

Ia menambahkan, kepedulian sosial menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, berbagai tindak kejahatan sering kali dapat dicegah apabila masyarakat tidak bersikap acuh terhadap kondisi di sekitarnya.

Jeje mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan kepada pengurus RT, RW maupun aparat setempat apabila menemukan aktivitas yang dianggap mencurigakan, seperti keluar-masuk orang yang tidak dikenal dalam waktu yang tidak wajar, suara keributan yang berlangsung terus-menerus, maupun kondisi lain yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Di sisi lain, ia juga meminta pengurus RT dan RW melakukan pendataan secara berkala terhadap seluruh penghuni rumah kontrakan dan indekos, termasuk tamu yang tinggal dalam waktu tertentu. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari administrasi kependudukan sekaligus upaya memperkuat sistem keamanan berbasis lingkungan. (SPJ-07)

Lebih dari Separuh Dapur SPPG Garut Telah Bersertifikat SLHS

GARUT | SPJNEWS - Dapur SPPG masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, pasalnya sampai bulan Mei 2026 masih banyak Dapur SPPG yang diindikasikan belum mengatongi sertifikat utama, semisal sertifikat halal, IPAL, dan SLHS. Anisa Nurul Husna petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjelaskan per 27 Maret 2026 sekitar 60 dapur SPPG yang sudah memiliki sertifikat halal, dari total 470 SPPG, dimana ada kelonggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) memberi waktu selama 6 bulan untuk penerbitan sertifikat halal.

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Agus Dinar saat di wawancara diruang kerjanya, dirinya menerangkan, " kalau dilihat

update terakhir jumlah SPPG di Kabupaten Garut per 11 Mei di akun MBG BGN itu 470, sedangkan jumlah SPPG yang sudah terbit SLHSnya itu 253, jadi Garut kalau dilihat presentasi dari Provinsi itu sebetulnya sudah cukup baik dari penerbitan SLHS, sebetulnya kewenangan penerbitan SLHS bukan kewenangan Dinas Kesehatan, lalu siapa yang menerbitkan SLHS yaitu Dinas DMPTSP ", ungkap Agus Dinar.

Sambung Agus, apa peran Dinas Kesehatan, peranan Dinas Kesehatan dalam tahapan teknis kesiapan mulai dari mana saja, ada namanya Inpeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten sampai Puskesmas, seluruhnya diperiksa dari bahan-

bahannya, di IKL itu minimal nilainya ada 80 yang harus terpenuhi oleh SPPG, ujarnya.

Ketika syarat itu terpenuhi lab juga terpenuhi, di laboratorium itu mulai dari airnya, makanannya, pekasasnya termasuk semple makanannya diperiksa tidak boleh ada bakteri airnya juga harus bersih, proses lab itu minimal 15 hari menunggu keluar hasil, siapa yang melakukan pemeriksaannya yaitu Lakesda, tandas Agus. Kemiskinan & Kelaparan

Jadi kalau kita Bidang Kesehatan Masyarakat melakukan PKP (Pelatihan Keamanan Pangan), minimal 50% dari penjamah makanan idealnya semua penjamah makanan harus mengikuti pelatihan, setelah unsur-unsur itu terpenuhi diperiksa

melalui aplikasi Sijempol mulailah dimohon SPPG itu lalu kita keluarkan surat rekomendasi dan semua alur proses itu juga online kita rekomendasikan masuk di akunnya DPMPTSP, setelah itu DPMPTSP periksa lagi persyaratan baik administrasi setelah seluruhnya terpenuhi baru DPMPTSP menandatangani sertifikat SLHS, tanfasnya.

Proses penertibatan sertifikat SLHS itu relatif, kalau misalkan ketika SPPG meminta kami memeriksa eh ternyata baru operasi belum ada semple makanannya sehingga menunggu dulu, tetapi ketika semple makanan sudah ada dikirim itu minimal 15 hari untuk dilakukan pemeriksaan, kenapa karena ada biakan makanan yang harus muncul bakterinya ataupun organisme masalah



lainnya, setelah itu di PKP seringkali SPPG itu kalau hari kerja tidak bisa, kenapa karena lagi operasi kan biasanya hari sabtu, walaupun hari sabtu tetap kami fasilitasi, pungkasnya. (AJANGPENDI)

34 Pembina Pramuka Kabupaten Bandung Lulus Kursus Pamong Saka

KAB. BANDUNG | Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung, Kak Euis Sumiati, secara resmi menutup kegiatan Kursus Pamong Satuan Karya (Saka) Pramuka Tingkat Kwartir Cabang Kabupaten Bandung pada Rabu, 1 Juli 2026 lalu.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026 tersebut berhasil meluluskan sebanyak 34 pembina Pramuka yang berasal dari berbagai unsur dan wilayah di Kabupaten Bandung.

Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa (Binawasa) Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung, Kak Euis Sumiati. Dalam laporannya, Pemimpin Kursus, Kak Dadi Barkah Santosa, menyampaikan bahwa seluruh peserta telah mengikuti rangkaian kegiatan dan dinyatakan lulus setelah menyelesaikan seluruh materi dan proses pembelajaran yang telah ditetapkan.

Prosesi penutupan ditandai dengan pelepasan tanda peserta secara simbolis serta penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta oleh Kak Euis Sumiati sebagai bentuk pengukuhan para peserta sebagai Pamong Saka yang siap menjalankan tugas pembinaan di wilayah masing-masing.

Dalam sambutannya, Kak Euis Sumiati menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen peserta selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, keberadaan Pamong Saka memiliki peran strategis dalam membina dan mengembangkan minat, bakat, serta keterampilan Pramuka Penegak dan Pandega melalui berbagai bidang keahlian yang terdapat di Satuan Karya Pramuka.

Organisasi & Sumber Daya Pemuda la berharap para peserta dapat menjadi motor penggerak dalam menghidupkan kembali aktivitas pangkalan Saka di tingkat kwartir ranting serta menghadirkan berbagai inovasi dalam pembinaan



kepramukaan di Kabupaten Bandung. Selama pelaksanaan kursus, peserta memperoleh berbagai materi penting, mulai dari tata kelola organisasi Saka, penyusunan program kerja berbasis krida, metode pembinaan bagi Pramuka Penegak

dan Pandega, hingga penguatan kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta sebagai mitra Saka.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan

Rencana Tindak Lanjut (RTL) di pangkalan masing-masing sehingga hasil kursus dapat memberikan dampak nyata terhadap penguatan Gerakan Pramuka, khususnya pengembangan Satuan Karya Pramuka di Kabupaten Bandung. (SPJ-04)

32 Pramuka Penggalang Bandung Bersiap ke Jamnas XII 2026

KAB. BANDUNG | Kabupaten Bandung – Sebanyak 32 Pramuka Penggalang terbaik dari berbagai kwartir ranting di Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan Training Center (TC) sebagai bagian dari persiapan menghadapi Jambore Nasional XII Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pimpinan Kontingen Cabang Kabupaten Bandung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di Bumi Perkemahan Gentong, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah. Referensi Geografis

Pemusatan latihan ini menjadi tahapan penting dalam membentuk kesiapan kontingen sebelum berlaga pada ajang kepramukaan tingkat nasional. Selama tiga hari, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kedisiplinan, serta kekompakan tim.

Kegiatan dipimpin oleh Pimpinan Kontingen Cabang, Kak Tika Ratna Mayestika dan Kak Indra Nuryana, S.Pd., bersama para pem-



bina pendamping. Selain itu, kegiatan juga mendapat perhatian dari Pimpinan Kontingen Daerah Jawa Barat, Kak Dadi Barkah Santosa, yang hadir memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh peserta.

Berbagai materi diberikan selama pelaksanaan Training Center, mulai dari latihan upacara penggalang, orientasi medan, teknik pengemasan perlengkapan, penjelajahan, simulasi kegiatan Jambore Nasional, permainan besar, hingga

refleksi kegiatan. Seluruh materi disampaikan melalui metode diskusi, dinamika kelompok, praktik lapangan, dan simulasi untuk membangun kesiapan peserta secara menyeluruh.

Selain meningkatkan keter-

ampilan kepramukaan seperti pionering, baris-berbaris, dan teknik berkemah, kegiatan ini juga difokuskan pada pembentukan karakter peserta agar memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu bekerja sama dalam satu tim.

Pimpinan Kontingen Cabang menegaskan bahwa Training Center tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis peserta, tetapi juga membangun mental, kepemimpinan, serta karakter sebagai duta Kabupaten Bandung pada ajang nasional.

Dengan pelaksanaan Training Center ini, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung optimistis seluruh peserta akan memiliki kesiapan fisik, mental, dan keterampilan yang optimal untuk mengikuti Jambore Nasional XII Tahun 2026 serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Bandung di tingkat nasional melalui prestasi dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai kepramukaan. (SPJ-04)

Persiapan MPLS Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun Dimatangkan

MADIUN | SPJNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar rapat pleno koordinasi persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun di Aula Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Kamis (9/7/2026). Rapat ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh kesiapan pelaksanaan MPLS berjalan lancar sesuai jadwal.

Kegiatan dihadiri oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rachmat Koesnadi, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun Tarnu Ashidiq mewakili Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Arif, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dr. Anis Djaka, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun Wisma Eka Nurcahyanti serta jajaran Katimkab PKH, Pendamping PKH, Koordinator TKSK se-Kabupaten Madiun yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Dalam arahnya, Rachmat Koesnadi menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan



Media Cetak & Online
PJNews.id
Singkat Padat Jelas

sarana dan prasarana, tetapi juga pada sinergi seluruh pihak yang terlibat.

"MPLS menjadi gerbang awal pembentukan karakter dan adaptasi peserta didik. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus berjalan optimal agar seluruh layanan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan

pendampingan sosial dapat diberikan secara maksimal sejak hari pertama," ujarnya.

Sementara itu, Tarnu Ashidiq Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa pleno ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh instansi terkait mengenai pembagian tugas dan

tanggung jawab selama pelaksanaan MPLS.

"Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terpadu sehingga pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun berlangsung tertib, aman, dan memberikan pengalaman belajar yang baik bagi para siswa," katan-

ya. Kepala Dinas Pendidikan menambahkan bahwa kesiapan tenaga pendidik, kurikulum pengenalan lingkungan sekolah, serta pembinaan karakter menjadi fokus utama selama masa MPLS. Di sisi lain, Dinas Kesehatan memastikan dukungan layanan kesehatan bagi seluruh peserta didik, sedangkan BPS siap mendukung penyediaan data yang dibutuhkan dalam pengembangan program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan pihak terkait diharapkan terus bersinergi agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Melalui rapat pleno ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat kolaborasi demi kesuksesan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Madiun sebagai program strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. (PY-102)

Dua Siswi Jombang Lolos Olimpiade Nasional Sains

JOMBANG | SPJNEWS – Dua siswi asal Kabupaten Jombang berhasil mengharumkan nama daerah dengan lolos ke ajang Olimpiade Matematika dan Fisika tingkat nasional. Keduanya adalah Mysha Samaria Firzana dari SMP Negeri 1 Mojoagung dan Shareefa Isna Prawida dari SMP Negeri 2 Jombang.

Atas prestasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jombang, Wor Windari, memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras serta dedikasi yang telah ditunjukkan kedua siswa dalam bidang akademik.

Menurut Wor Windari, keberhasilan menembus kompetisi sains tingkat nasional menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Jombang terus berkem-

bang dan mampu bersaing dengan daerah lain. "Kami sangat bangga atas pencapaian kedua siswa ini. Keikutsertaan mereka dalam Olimpiade Matematika dan Fisika tidak hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah dan keluarga, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jombang," ujarnya.

Ia menilai prestasi tersebut menunjukkan besarnya potensi generasi muda Jombang apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang tepat dari sekolah, guru, serta orang tua.

Disdikbud Jombang berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan akademik, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Menurutnya, semangat bela-

jar, kedisiplinan, serta keberanian mengikuti kompetisi merupakan modal penting untuk menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Disdikbud juga berkomitmen terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pembinaan prestasi siswa, penguatan kompetensi guru, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan akademik yang mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik.

Selain memberikan apresiasi kepada kedua siswi berprestasi tersebut, penghargaan juga diberikan kepada pihak sekolah dan para guru pembimbing yang telah berperan aktif dalam mendampingi dan mempersiapkan siswa hingga mampu tampil di tingkat nasional.



Kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berprestasi.

Dengan capaian ini, diharap-

kan semakin banyak pelajar Jombang yang termotivasi untuk meraih prestasi di berbagai bidang serta membawa nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional. (Ratno)



KPK-Kejati Jabar Sepakat Tukar Data Korupsi

BANDUNG | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sepakat melakukan supervisi bersama serta bertukar data penyidikan. Langkah taktis ini diambil untuk membongkar sumbatan (bottleneck) penanganan sejumlah kasus korupsi di Jawa Barat yang kini menjadi atensi publik.

Sinergi agresif kedua lembaga penegak hukum ini menandai babak baru dalam pemberantasan perkara tipikor Jabar. Melalui skema ini, tidak ada lagi sekat informasi yang menghambat proses hukum.

Mengapa Sekat Informasi Perkara Tipikor Jabar Harus Dibongkar?

Selama ini, koordinasi antar-lembaga sering kali terjebak dalam formalitas birokrasi. Padahal, penuntasan perkara korupsi di Jawa Barat membutuhkan gerak cepat agar tidak kehilangan momentum pembuktian. Oleh karena itu, hambatan komunikasi dan perbedaan pemetaan pasal kini dipangkas habis.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Sutikno, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran tim KPK dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kejaksaan Agung menjadi motor penggerak baru.

"Kedatangan teman dari KPK bersama monev Kejaksaan Agung ini dalam rangka koordinasi mencocokkan data kembali, progresnya kayak apa? Kendalanya di mana?" ujar Sutikno di Kantor Kejati Jabar, Bandung, Kamis (9/7/2026).

Menurut Sutikno, keterbukaan ini merupakan bentuk sinergi nyata antar-penegak hukum. Target uta-

manya adalah agar penanganan perkara itu cepat selesai dan cepat pula memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Strategi Taktis Menghapus Mandek Kasus Korupsi

Lantas, bagaimana kedua lembaga ini mengeksekusi target tersebut? Rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (9/7/2026) langsung merumuskan formula operasional di lapangan. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kussumastuti, Kajati Jabar Sutikno, dan Hentoro dari bidang Monev Kejagung ini menghasilkan tiga kesepakatan krusial.

"Kami melakukan pemetaan, sinkronisasi data, dan strategi penanganan perkara korupsi yang sedang berjalan di wilayah Jabar," jelas Sutikno menambahkan.

Melalui sinkronisasi ini, masalah yang awalnya mengganjal proses penyidikan langsung dicarikan jalan keluar di meja diskusi. Alhasil, potensi tumpang tindih penanganan perkara tipikor Jabar dapat ditekan seminimal mungkin. Kedua belah pihak kini memiliki basis data tunggal yang diperbarui secara real-time.

Apresiasi KPK atas Akselerasi Hukum di Tanah Pasundan

Langkah responsif korps Adhyaksa Jawa Barat ini mendapat lampu hijau dan apresiasi tinggi dari Gedung Merah Putih KPK. Komisi antirasuah menilai ada keseriusan radikal dari jajaran Kejati Jabar untuk membersihkan wilayahnya dari praktik lancung. (SPJ-05)

Plt Bupati Dilaporkan atas Dugaan Penipuan

SPJNEWS.ID | TULUNGAGUNG - Sebuah kabar yang mengiris nurani publik menyeruak dari jantung Kabupaten Tulungagung. Nama besar seorang pejabat daerah, PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, kini terseret dalam pusaran dugaan penipuan dan penggelapan uang rakyat. Sabtu (27/06/2026) lalu.

Seorang warga desa Mangunsari, Husnil Labib Al Farobi, dengan hati yang perih dan keberanian yang tak tergoyahkan, resmi melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Tulungagung. Dalam laporan bernomor STTLP/92/VI/2026/SPKT, ia menegaskan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebesar Rp 1,5 miliar rupiah.

Dana itu, menurutnya, digu-

"Kekuasaan tanpa moral hanyalah tirani." Maka, kasus ini bukan sekadar angka miliaran rupiah"

nakan untuk pembangunan SPPG di wilayah Mangunsari, namun berujung pada kecurigaan yang mencederai rasa keadilan.

Peristiwa yang disebut terjadi pada 23 November 2025 pukul 21:27 WIB ini, kini menjadi sorotan tajam.

Pasal 492 dan 486 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP disebut sebagai landasan hukum yang menjerat dugaan perbuatan tersebut.

Sungguh ironis, ketika rakyat

menaruh harapan pada pemimpin, justru yang muncul adalah kabut kecurigaan. Nama Ahmad Baharudin, yang beralamat di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, kini menjadi buah bibir. Publik bertanya-tanya: apakah ini sekadar badai politik, atau benar-benar luka hukum yang harus dijawab dengan keadilan?

"Kekuasaan tanpa moral hanyalah tirani." Maka, kasus ini bukan sekadar angka miliaran rupiah, melainkan ujian moralitas kepemimpinan di daerah.

Apakah laporan ini akan membuka tabir gelap praktik kekuasaan, atau justru terkubur dalam kompromi politik? Rakyat Tulungagung menanti jawaban yang jernih, bukan sekadar janji. (Mualimin)

Modus Korupsi Dana Hibah KONI Majalengka Terungkap

MAJALENGKA | Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka akhirnya membeberkan cara kotor yang digunakan dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Majalengka. Kasus penyalahgunaan anggaran ini menetapkan dua petinggi lembaga olahraga tersebut, yakni Bakti Anugrah selaku Ketua KONI dan DER selaku Bendahara KONI, sebagai tersangka utama. Berdasarkan pendalaman tim jaksa penyidik, ditemukan bukti kuat mengenai adanya manipulasi laporan keuangan. Kepala Kejari Majalengka,

Sukma Djaya Negara, menegaskan bahwa berkas pertanggungjawaban yang diserahkan para tersangka terindikasi kuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.

"Dalam pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Majalengka, kedua tersangka secara bersama-sama membuat laporan pertanggungjawaban fiktif," ujar Sukma.

Aksi lancung para tersangka tidak berhenti di situ. Kejaksaan juga mengendus adanya kebijakan sepihak berupa pemangkasan anggaran yang menyasar seluruh

cabang olahraga (cabor). Modusnya, uang tersebut dipotong dengan dalih kewajiban penyeteroran pajak, namun pada kenyataannya dana itu menguap begitu saja. "Melakukan pemotongan seolah-olah untuk pembayaran pajak yang dibebankan kepada seluruh cabang olahraga. Sedangkan pengelolaan pajak tersebut tidak pernah dilakukan penyeteroran oleh tersangka BN maupun tersangka DER," katanya.

Di samping itu, aparat penegak hukum menemukan sederet program fiktif atau aktivitas bodong



yang sama sekali tidak terdaftar dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurut penjelasan Sukma, alokasi dana yang dilarikan ke luar

agenda resmi NPHD tersebut disalurkan kuat mengalir langsung untuk memperkaya diri para tersangka. (SPJ-08)

GMBI Nganjuk Peringatkan Sekolah Negeri Tinggalkan Pungli

NGANJUK | SPJNEWS.ID - Banyaknya keluhan dan aduan dari masyarakat yang saat ini anaknya melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi, baik di tingkat SD, SLTP, dan atau SLTA / Sederajat, yang merasa terbebani oleh kebijakn pihak sekolah, kebingungan mau mengadu ke mana.

Di tengah situasi ekonomi yang kian menjepit, beban berat justru kembali menghantam pundak para orang tua murid baru di Kabupaten Nganjuk. "Tradisi" ta-

hunan berupa bisnis jual-beli kain seragam di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri diduga kuat mulai digulirkan kembali secara terselubung. Berdasarkan kesaksian salah satu wali murid berinisial S, pada senin 29/6/26 yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan sang anak, yang hendak bersekolah di salah satu SMAN di Nganjuk "mengungkap" biaya yang dipatok oleh pihak sekolah dinilai sangat fantastis untuk ukuran se-

kolah negeri. "Bagi siswa laki-laki ukuran standar dikenakan biaya Rp 1.350.000, sedangkan untuk ukuran jumbo mencapai Rp 1.650.000," ungkap S saat dikonfirmasi.

Beban lebih besar harus ditanggung oleh orang tua murid perempuan. Untuk ukuran standar, harga paket kain dibanderol seharga Rp 1.650.000, sementara untuk ukuran jumbo melonjak hingga Rp 1.850.000.

Menyikapi dugaan pungli

berkedok jual kain mentah untuk seragam sekolan ini, Sdr. Sugito selaku Ketua LSM GMBI Kab. nganjuk, saat di temui awak media pada hari rabu 1 Juli 2026, dengan tegas mengatakan " Jangan jadikan lembaga pendidikan untuk ajang bisnis cari keuntungan dengan cara melanggar hukum, jika terbukti ada praktek Pungli di sekolah tersebut, kami tidak segan untuk menindaklanjuti dengan melaporkan ke APH dan Dinas terkait," Pungkasnya. (Alf)



Selisih Dana Hibah Rp 50.000.000 Jadi Sorotan Aktivis



NGANJUK | SPJNEWS.ID - Pasca digelar acara di stadion Anjuk Ladang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk bergerak cepat meluruskan spekulasi publik terkait adanya dugaan selisih anggaran dalam penyaluran dana hibah insentif Guru TPA/TPQ dan Huffadz (Penghafal Al-Qur'an) se-Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026. Sabtu, (27/06/2026).

Isu ini sempat memicu tanda tanya di kalangan aktivis, acara "Apel Pembinaan dan Penyerahan Insentif 8.089 Guru TPA/TPQ & Huffadz", Sabtu pagi.

Pemicunya adalah perbedaan angka yang cukup mencolok pada visual publikasi. Di satu sisi, banner acara dan laporan media menyebut-

kan bantuan diberikan kepada 8.089 guru dengan nominal Rp1.000.000 per orang. Jika dikalkulasikan, angka tersebut menyentuh Rp8,089 miliar.

Namun di sisi lain, papan simbolis penyerahan dana yang dipegang oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) justru tertulis sebesar Rp8.139.000.000.

Selisih angka sebesar Rp50 juta inilah yang sempat dipertanyakan oleh salah satu aktivis lokal karena dianggap tidak sinkron.

Guna hindari bola liar di masyarakat, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi langsung memberikan klarifikasi tegas dan transparan pada hari yang sama. Melalui sambutan telepon dan pesan singkat, tidak ada satu rupiah pun dana yang

"hilang" atau tidak jelas peruntukannya. "Dana hibah insentif tahun 2026 ini disalurkan melalui LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kabupaten Nganjuk. Total anggarannya memang Rp8.139.000.000," ujar Marhaen,

Lebih lanjut, Marhaen merinci Insentif Guru TPA/TPQ dan Huffadz: Dialokasikan penuh sebesar Rp8.089.000.000 untuk 8.089 orang penerima (masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 tanpa potongan).

Dana Operasional LPTQ Nganjuk: Dialokasikan sebesar Rp 50.000.000 guna mendukung keberlangsungan program, administrasi, dan kinerja organisasi LPTQ selaku lembaga pembina.

Dengan rincian tersebut, kalkulasi total anggaran menjadi klop dan tepat berada di angka Rp8,139 miliar.

Bupati menegaskan bahwa pemisahan anggaran operasional lembaga dan insentif personal adalah hal yang sah secara regulasi hibah. Langkah penuturan ini diharapkan dapat menyudahi kesalahpahaman serta menjadi bukti bahwa Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran, khususnya dalam program kesejahteraan para pejuang Al-Qur'an di Nganjuk. (Alf)

Kopdes Merah Putih di Puncak Gunung Viral, Pemdes Angkat Bicara

BANDUNG BARAT | Pemerintah Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai lokasi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang disebut berada di puncak gunung. Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah unggahan menyoroti pembangunan Kopdes Merah Putih di kawasan wisata Stone Garden, Desa Gunungmasigit, sehingga memunculkan anggapan bahwa bangunan itu berdiri di atas gunung.

Kepala Desa Gunungmasigit, Tarkopa, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan, bangunan Kopdes Merah Putih berlokasi di area kaki gunung dan berada tidak jauh dari kawasan permukiman masyarakat.

"Faktanya sangat berbeda dengan narasi yang menyebut Kopdes Gunung masigit berada di atas gunung. Lokasinya justru di bawah,

bahkan jaraknya ke RW 9 hanya sekitar 100 meter," ujar Tarkopa saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).

Tarkopa menerangkan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Gunungmasigit dibangun di kawasan Stone Garden. Meskipun wilayah tersebut dikenal sebagai objek wisata alam, ia menegaskan lokasi bangunan berada di kaki perbukitan dan berdekatan dengan permukiman penduduk.

Menurutnya, anggapan yang menyebut Kopdes Merah Putih berdiri di puncak gunung tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menjelaskan, jarak bangunan koperasi menuju RW 9 hanya sekitar 100 meter, sehingga klaim bahwa lokasinya berada jauh di atas gunung dinilai tidak tepat.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul ramainya pembahasan mengenai pembangunan Kopdes Merah Putih Gunungmasigit di media sosial yang sempat menarik perhatian publik. (SPJ-08)



Gandeng Komunitas Wokwekwak, Alumnus Daruul Ilmi Selenggarakan Khitanan Massal

BANDUNG BARAT | Alumnus Pondok Pesantren Daruul Ilmi, Desa Bojongmekar, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar khitanan massal bagi 10 anak yang berada di sekitar pontren tersebut.

Para alumnus yang tergabung dalam wadah Persaudaraan Alumni Darul Ilmi (PADI) tersebut, melakukan aksi sosial pada saat Reuni Akbar Daruul Ilmi, Sabtu kemarin (4/7/2026) lalu.

Ketua Panitia Reuni Akbar Daarul Ilmi 2026, Roni Dahroni, mengatakan jika reuni kali ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia antar-alumni saja, tetapi juga memberikan dampak sosial yang bisa dirasakan masyarakat langsung.

Pihaknya menggandeng Wokwekwak karena komunitas ini sudah terbiasa dan cukup profesional dalam menangani khitanan massal.

"Kami ingin Reuni Akbar 2026 ini membawa keberkahan. Alhamdulillah, seluruh proses berjalan lancar dan keluarga mereka tampak bahagia," ujar Roni, saat dihubungi Senin (6/7/2026).

Ia juga menyebutkan, ke-10 anak yang mendapat khitan gratis diberikan santunan berupa paket sembako dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KBB, serta paket bin-



gkisan dari panitia sebagai bentuk apresiasi atas keberanian mereka.

Kegiatan bernuansa sosial dan dakwah ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Yayasan Daarul Ilmi Bandung sekaligus pengelola Pesantren Terpadu Daarul Ilmi, Ustad Jafar Sidik, SE.

Ust Jafar menyatakan, jika reuni tahun ini, menjadi langkah nyata bagi para alumnusnya. Mereka mampu membuktikan bahwa alum-

ni tidak hanya kuat dalam menjaga tali silaturahmi, tetapi juga kokoh dalam bergerak di jalan dakwah dan kepedulian sosial.

"Kami sangat bangga dan mengapresiasi inisiatif dari para alumni yang tergabung dalam PADI. Semoga Pesantren Terpadu Daarul Ilmi bisa terus melahirkan generasi yang bermanfaat bagi umat," tuturnya.

Senada dengan hal tersebut,

Pengasuh Pesantren Terpadu Daarul Ilmi, Ustadz Suhardi Abdul Hamid H., S.Th.I., menegaskan komitmen pesantren untuk terus membuka ruang kolaborasi yang erat dengan para alumni.

Keberhasilan aksi sosial ini diharapkan mampu menjadi pematik semangat bagi para santri yang saat ini masih menimba ilmu.

Menurutnya, pihak Pontren berkomitmen penuh untuk terus

berkolaborasi dengan alumni dalam berbagai program positif.

Kehadiran dan kepedulian para alumni yang saat ini sudah tersebar di berbagai daerah dan profesi, harus menjadi motivasi besar bagi para santri kami yang ada di pesantren. "Mereka bisa melihat langsung bukti nyata bahwa setelah lulus nanti, mereka juga bisa sukses dan memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat," ungkapnya. [SPJ-09]

Camat Pagerwojo Hadiri Acara Penghargaan Wana Lestari

SPJ NEWS.ID | TULUNGAGUNG - Dalam suasana penuh kesejukan lereng Gunung Wilis, Kecamatan Pagerwojo menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang sarat makna: penyambutan Tim Penilai Penghargaan Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2026.

Acara ini berlangsung di Desa Samar, pusat aktivitas Kelompok Tani Hutan "Sumber Lestari" yang telah lama menjadi teladan dalam menjaga kelestarian alam. Kamis (09/07/2026) lalu

Camat Pagerwojo dalam sambutannya menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar kompetisi administratif, melainkan momentum spiritual untuk meneguhkan kembali hubungan manusia dengan alam. Dengan gaya tutur

yang penuh kebijaksanaan, beliau mengingatkan: "Janganlah kita meninggalkan air mata bagi anak cucu kita, tetapi tinggalkanlah mata air yang jernih dan melimpah untuk generasi yang akan datang." Harmoni Alam dan Masyarakat.

Desa Samar tampil sebagai simbol kesadaran ekologis. Deretan pot dan polibag berisi sayuran serta tanaman obat keluarga bukan hanya hiasan, melainkan tanda bahwa masyarakat telah menanamkan nilai hidup berdampingan dengan alam sejak dari pekarangan rumah.

Kelompok Tani Hutan "Sumber Lestari", yang berdiri sejak 2010, telah menanam lebih dari 10.000 pohon dan mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 600,3 hektare. Keberhasilan ini tampak nyata



dalam terjaganya 15 titik mata air alami yang menopang kehidupan warga sekaligus mengalir menuju Bendungan Wonorejo, kebanggaan Tulungagung.

Sinergi dan Gotong Royong,

Dalam sambutannya, Camat Pagerwojo menekankan bahwa capaian ini lahir dari sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan kelompok tani. Gotong royong menjadi ruh yang menghidupkan setiap langkah,

dari pengolahan pupuk kompos hingga budidaya madu klanceng, dari kerajinan bambu hingga integrasi peternakan sapi perah dengan kehutanan.

Rakyat sejahtera, bangsa berjaya. Dengan penuh harap, Camat Pagerwojo memohon agar Desa Samar diberi kesempatan memperoleh nomor urut kecil dan nilai besar dalam penilaian Wana Lestari. Lebih dari itu, beliau menegaskan bahwa penghargaan sejati adalah keberlanjutan alam dan kesejahteraan rakyat.

Acara ini menjadi cermin filosofis: bahwa pembangunan sejati bukan hanya soal materi, melainkan ikhtiar spiritual untuk menjaga amanah Allah berupa bumi dan segala isinya. (Mualimin)

Kwarcab Pramuka Bandung Tingkatkan Kompetensi Pembina

KAB. BANDUNG | Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bandung menggelar Kursus Pamong Satuan Karya (Saka) Pramuka Tingkat Kwartir Cabang yang berlangsung pada 29 Juni hingga 1 Juli 2026 di Sekretariat Kwarcab Pramuka Kabupaten Bandung, Jalan RAA Wiranatakusumah Nomor 19, Baleendah. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Kwartir Ranting serta unsur pimpinan Satuan Karya Pramuka dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung. PanduanKota & Daerah

Pelaksanaan kursus ini menjadi bagian dari upaya Kwarcab dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Gerakan Pramuka, khususnya para Pamong Saka yang memiliki peran penting dalam membina anggota Pramuka Penegak dan Pandega sesuai bidang keahlian dan kesakaan masing-masing.

Pembukaan kegiatan dihad-



iri sejumlah jajaran pengurus dan pemangku kepentingan, di antaranya Iyan Mulyana, Tatan Munandar, Hanna Fauziah, K. Saeful Akbar, Acep Mansur, serta Dadi Darkah Santosa bersama jajaran pelatih dari Pusdiklatcab Parahyangan Kabupaten Bandung.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris I Kwarcab Ka-

bupaten Bandung melalui proses penancapan kapak sebagai simbol dimulainya kursus. Acara dilanjutkan dengan penyerahan Pataka Pusdiklatcab kepada pimpinan kursus serta pemasangan tanda peserta atau ID Card secara simbolis kepada perwakilan peserta oleh unsur Kwarcab dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan menerima berbagai materi sesuai kurikulum pendidikan dan pelatihan Pamong Saka yang telah disusun untuk meningkatkan kapasitas pembinaan di lingkungan Satuan Karya Pramuka.

Dalam sambutannya, Kak Iyan Mulyana menegaskan bahwa keberadaan Satuan Karya Pramuka harus terus diperkuat sebagai sarana pendidikan karakter dan pengembangan keterampilan generasi muda yang relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja.

Menurutnya, optimalisasi peran Saka menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak generasi muda yang unggul, berakarakter, sekaligus memiliki kompetensi di bidang tertentu. Karena itu, peningkatan kualitas Pamong Saka melalui pendidikan dan pelatihan dinilai sebagai investasi penting bagi masa

depan pendidikan kepramukaan di Kabupaten Bandung. PanduanKota & Daerah

Sementara itu, panitia penyelenggara menjelaskan bahwa Gerakan Pramuka memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi kaum muda agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Melalui Kursus Pamong Saka ini, anggota dewasa Gerakan Pramuka dibekali kemampuan teknis dan manajerial untuk menjadi pembina yang profesional di lingkungan Satuan Karya. Para peserta diharapkan mampu mengelola, mengembangkan, serta membimbing anggota Saka sesuai bidang kesakaan masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga mengacu pada Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa Pamong Saka harus memiliki pendidikan dan kompetensi yang memadai guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, kepemimpinan, serta jiwa pengabdian anggota Pramuka Penegak dan Pandega. (SPJ-08)

LSM BADAK Desak Usut Pembelian Aset...

<< DARI HALAMAN 1

Menurut hasil analisis internal LSM BADAK, terdapat sejumlah indikasi yang perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Salah satunya adalah dugaan adanya selisih nilai dalam proses pembelian aset yang dinilai cukup signifikan.

LSM BADAK menyoroti persoalan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang disebut belum dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kondisi tersebut, menurut mereka, menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kelengkapan administrasi maupun legalitas aset yang dibeli menggunakan anggaran daerah.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun organisasi tersebut, nilai appraisal atau penilaian harga transaksi diduga berada jauh di bawah angka Rp10 miliar. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp13 miliar melalui APBD untuk pembelian aset tersebut.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan LSM BADAK dengan men-

gacu pada harga tanah di sekitar lokasi, mereka memperkirakan adanya potensi kerugian keuangan negara yang nilainya dapat mencapai lebih dari Rp6 miliar. Meski demikian, besaran kerugian tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan audit oleh lembaga yang berwenang.

Atas dasar itu, LSM BADAK meminta Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, dan independen terhadap seluruh tahapan proses pengadaan aset, mulai dari penentuan nilai appraisal, mekanisme penganggaran, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

"Kejaksaan harus jeli dalam mengungkap persoalan ini. Masyarakat juga harus ikut mengawal dengan ketat agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan. Jangan sampai ada pihak yang dijadikan kambing hitam. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran hukum, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Suwandi.

la menambahkan, upaya pengawalan yang dilakukan LSM BADAK bukan semata-mata bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Menurut Suwandi, praktik korupsi, apabila benar terjadi, bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, semangat amar ma'ruf nahi munkar harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk melalui pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

LSM BADAK berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara objektif dengan mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan profesionalisme.

Organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawal proses hukum secara kritis namun tetap menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. (Mualimin)

Temuan BPK di Garut...

<< DARI HALAMAN 1

Selain dua kecamatan tersebut, terdapat lima kecamatan lainnya yang juga masuk dalam objek pemeriksaan BPK dengan nilai temuan yang secara keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah.

Temuan tersebut menjadi perhatian Aliansi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut. Dalam audiensi yang digelar bersama sejumlah camat pada Senin (15/6/2026).

HMI mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi BPK serta meminta adanya penyelesaian yang transparan dan akuntabel.

Audiensi tersebut difasilitasi oleh anggota DPRD Kabupaten Garut Komisi I, Iman Alirahman. Pertemuan juga dihadiri Inspektorat Kabupaten Garut dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Inspektur Inspektorat Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi, menegaskan bahwa seluruh kecamatan yang menjadi objek pemeriksaan telah melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK.

"Tujuh kecamatan sebagaimana tadi dibahas di sini, sudah menyelesaikan tindak lanjutnya, semuanya," ujar Didit.

Menurutnya, seluruh kewajiban pengembalian telah diselesaikan, baik yang disetorkan ke kas daerah maupun ke kas negara untuk kewajiban perpajakan.

Didit menjelaskan bahwa para camat telah menyerahkan dokumen pendukung sebagai bukti penyelesaian, bahkan proses pengembalian tersebut dilakukan sebelum batas waktu 60 hari sebagaimana diperintahkan Bupati Garut.

Dalam audiensi itu juga disampaikan bahwa total dana yang telah dikembalikan oleh tujuh kecamatan mencapai lebih dari Rp400 juta.

Selain itu, kekurangan pembayaran pajak sekitar Rp22 juta juga telah disetorkan ke kas negara.

"Ke kas daerah dan ada yang ke kas negara untuk pajak. Dua puluh dua juta yang kekurangan pajak itu sudah ke kas negara. Sudah selesai," tegasnya.

Meski demikian, Didit menegaskan bahwa penilaian akhir tetap berada di tangan BPK. (Ajang Pendi)

Diplomasi Kopi hingga History Walk, Ini Misi Besar Bandung di Festival Asia Afrika 2026

Pemerintah Kota Bandung menyambut kedatangan 25 duta besar dari negara-negara Asia dan Afrika dalam rangkaian Festival Asia Afrika (FAA) 2026.

Kehadiran para diplomat tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pengajuan Jalan Asia Afrika sebagai Warisan Dunia UN-ESCO.

Persiapan menuju agenda internasional ini terus dimatangkan. Pemerintah daerah menempatkan aspek diplomasi sebagai prioritas agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sekaligus memperkuat posisi Bandung di mata dunia.

Diplomasi Kopi untuk Mendukung Misi UNESCO

Festival Asia Afrika resmi dibuka pada Jumat dengan sejumlah agenda penting, mulai dari simposium cagar budaya hingga jamuan makan malam bersama para duta besar dan perwakilan diplomatik.

Dalam jamuan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengangkat kopi sebagai media diplomasi budaya. Kopi Aroma, salah satu merek legendaris Bandung, akan disajikan bersama berbagai produk unggulan hasil olahan petani lokal Bandung Raya sebagai bentuk promosi potensi daerah kepada tamu mancanegara.

Selain memperkenalkan produk lokal, pemerintah juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat dukungan terhadap proses pengajuan Jalan Asia Afrika sebagai Warisan Dunia UNESCO.

Wali Kota Bandung Muham-

mad Farhan mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan seluruh dokumen administrasi yang menjadi syarat pendaftaran.

"Prosesnya memang tidak bisa sebentar. Sekarang kami sedang menyiapkan seluruh dokumen pendaftaran agar Jalan Asia Afrika dapat didaftarkan sebagai Warisan Dunia UNESCO," ujar Farhan, Rabu (8/7/2026) lalu. Pemerintah menargetkan seluruh dokumen rampung dan diserahkan kepada Kementerian Kebudayaan pada September 2026 sebelum diteruskan ke kantor pusat UNESCO di Paris.

History Walk Angkat Semangat Inklusivitas

Memasuki hari kedua, Sabtu (11/7/2026), para delegasi akan mengikuti kegiatan History Walk yang dimulai dari Hotel Savoy Homann hingga berakhir di Gedung Merdeka.

Tahun ini, kegiatan tersebut menghadirkan nuansa berbeda. Sebelum pawai budaya dimulai, peserta akan mendengarkan pidato mengenai pentingnya kesetaraan sosial dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta kelompok lanjut usia. Aktivis disabilitas dan lansia Farhan Helmy dijadwalkan menjadi pembicara dalam sesi tersebut.

Menurut Farhan, penyampaian pesan tersebut menjadi bagian dari semangat Konferensi Asia



Afrika yang tetap relevan hingga saat ini.

"Semangat yang ingin kami hadirkan adalah bahwa Asia Afrika juga berbicara mengenai inklusivitas," katanya.

Setelah History Walk selesai, kawasan sekitar akan diramaikan dengan berbagai pertunjukan seni, bazar, hingga seminar interaktif yang berlangsung sampai Minggu (12/7/2026).

Salah satu agenda yang menarik perhatian ialah presentasi Duta Besar Palestina untuk Indonesia serta penampilan delegasi kebudayaan Malaysia yang hadir untuk menjajaki peluang kerja sama.

Festival Lebih Ringkas, Ruang Lebih Besar bagi Seniman Lokal

Pelaksanaan Festival Asia Afrika tahun ini dikemas lebih sederhana sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran daerah. Sejumlah pos pengeluaran dipangkas tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan acara.

Pemerintah Kota Bandung justru memaksimalkan keterlibatan seniman dan komunitas lokal sebagai pengisi utama berbagai pertunjukan.

"Yang penting semangat Festival Asia Afrika tetap hidup. Pengisi acaranya lebih banyak anak-anak Bandung," ujar Farhan.

Sebanyak 30 kelompok dipastikan ikut ambil bagian dalam pawai budaya yang dimulai pukul 08.00 WIB.

Keterlibatan mereka diharapkan menjadi ruang ekspresi sekaligus menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tetap dapat menghadirkan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rekayasa Lalu Lintas dan Penertiban Parkir Liar

Kemacetan menjadi salah satu fokus utama selama penyelenggaraan festival. Dinas Perhubungan bersama Polrestabes Bandung telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berdasarkan hasil

analisis dampak lalu lintas terbaru.

Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, pemerintah juga menyediakan kantong parkir resmi di kawasan Jalan Naripan hingga Cikapundung guna menghindari penumpukan kendaraan di ruas jalan utama.

Selain itu, pengawasan terhadap praktik parkir liar akan diperketat. "Kalau menemukan parkir liar, akan langsung kami tindak. Tidak boleh ada parkir liar dan tidak boleh ada getok parkir," tegas Farhan.

Seluruh biaya operasional petugas lapangan telah dialokasikan melalui APBD Kota Bandung Tahun 2026 sehingga masyarakat tidak akan dikenai pungutan di luar tarif resmi.

Efisiensi Anggaran dengan Dampak Jangka Panjang

Penyelenggaraan Festival Asia Afrika 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran mencerminkan pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah berupaya menjaga kualitas kegiatan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Strategi diplomasi kopi yang melibatkan pelaku usaha lokal, seperti Kopi Aroma, menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempromosikan potensi daerah.

Di sisi lain, percepatan pengajuan Jalan Asia Afrika sebagai Warisan Dunia UNESCO diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian sejarah, serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bandung dan Jawa Barat. ■ SPJ-RED

